



**Judul** : Komisi II DPR Minta Oknum Bawaslu Medan Di DKPP-Kan  
**Tanggal** : Senin, 11 Desember 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 8

## Bersihkan Nama Baik Bawaslu Komisi II DPR Minta Oknum Bawaslu Medan Di DKPP-kan

KOMISI II DPR menyoroti penonaktifan sementara anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan, Azlansyah Hashibuan. Mereka meminta Bawaslu bertindak lebih tegas, di antaranya membuat laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Azlansyah.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Azlansyah harus disikapi serius oleh Bawaslu Kota Medan. Pasalnya, kasus tersebut telah merusak kepercayaan masyarakat kepada institusi Bawaslu dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.

Meski proses hukum terhadap Azlansyah masih berjalan, Politisi Golkar ini mendorong Bawaslu Kota Medan bersikap bisa lebih tegas. Salah satunya melaporkan terduga pelaku ke DKPP karena pelanggaran etik.

"Kalau sudah OTT, bawa ke DKPP agar kredibilitas institusi (Bawaslu) tetap terjaga. Jangan biarkan (kasus yang menjerat anggota Bawaslu Kota Medan) lebih cepat di proses di polisi, daripada proses di internalnya sendiri. Segera ambil sikap!" tegas Doli melalui keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2023).

Diketahui, Polda Sumut melakukan OTT kepada oknum Bawaslu Kota Medan Azlansyah di Hotel JW Marriott Medan, Selasa (14/11/2023) malam. Anggota Bawaslu kota Medan yang kini dinonaktifkan sementara itu, diduga melakukan pemerasan terhadap calo anggota legislatif (caleg).

Dalam OTT tersebut, Polda mengamankan uang sebesar Rp 25 juta, serta menetapkan Azlansyah dan seseorang bernisial FWH sebagai tersangka pemerasan caleg. Namun, Bawaslu baru menonaktifkan Azlansyah.

Melanjutkan keterangannya, Doli mengatakan, persoalan integritas penyelenggara Pemilu merupakan hal serius.

Karenanya, pihak penyelenggara Pemilu harus mengambil langkah tegas atas kasus rasuah yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggara maupun pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kita harus menyelamatkan institusinya. Jangan sampai, masalah ini merembet, orang hilang kepercayaan distrust kepada penyelenggara Pemilu, yang pada akhirnya bisa distrust terhadap pemilunya. Jadi, harjs diambil tindakan tegas," ucap Doli.

Dia menekankan, kasus yang terjadi di Kota Medan, kemungkinan hanyalah puncak gunung es. Sebab, dari penelusurannya, terduga pelaku melakukannya praktik liciknya secara berjamaah.

Selain Bawaslu, Doli mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil sikap tegas, bila terdapat indikasi kasus rasuah anggota Bawaslu Kota Medan, turut menyeret oknum anggota KPU.

"Kalau ada oknum KPU yang terlibat, juga begitu (ambil sikap tegas)," pungkasnya.

Pengamat politik dari Universitas Darma Agung Medan Besti Rohana Simbolon menyatakan, tingkat kepercayaan masyarakat Medan terhadap lembaga pengawas pemilu sudah tidak 100 persen, pasca kasus OTT oknum Bawaslu Kota Medan. Menurut dia, integritas pengawas dianggap seharga Rp 25 juta oleh publik.

"Bagaimana pula bila ada yang sanggup memberikan Rp 100 juta? Itu yang menjadi penilaian masyarakat," sesal Rohana.

Dia menegaskan, perilaku Azlansyah telah mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu, sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu. Padahal, publik berharap, pesta demokrasi dilaksanakan dengan jujur, bersih dan adil.

"Sebelum pertandingan, mereka justru mendapat informasi kasus dugaan korupsi, yang mencoreng kejujuran dan keadilan. Tapi, masyarakat masih memiliki semangat Pemilu tidak tercoreng, dan masih layak diperjuangkan," ujarnya. ■ SSL